

**LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN
AKHIR TAHUN ANGGARAN 2021
RSUD MOHAMMAD NATSIR
PROVINSI SUMATERA BARAT**

KATA PENGANTAR

Puji syukur dipersembahkan kehadirat Allah SWT, karena atas limpahan rahmatnya Dokumen Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Akhir Tahun Anggaran 2021 RSUD Mohammad Natsir Provinsi Sumatera Barat ini dapat diselesaikan dengan baik. Dokumen Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Akhir Tahun Anggaran 2021 merupakan laporan yang disampaikan oleh Pemerintah Daerah kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang memuat hasil penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menyangkut pertanggungjawaban kinerja yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah selama 1 (satu) tahun anggaran.

Dokumen Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Akhir Tahun Anggaran 2021 menjadi dokumen laporan hasil kerja setiap perangkat daerah mengenai capaian kinerja penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi tanggung jawab dan kewenangannya.

Demikian Dokumen Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Akhir Tahun Anggaran 2021 disusun sebagai bentuk akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan yang berorientasi pada peningkatan kinerja.

Solok, Januari 2021

DIREKTUR RSUD MOHAMMAD NATSIR
PROVINSI SUMATERA BARAT,

dr. Elvi Fitraneti, Sp.PD

Pembina Tk I/ IV b

NIP. 19710514 200212 2 002

DAFTAR ISI

Halaman

KATA PENGANTAR

1

DAFTAR ISI

BAB I DATA/ INFORMASI UMUM PELAKSANAAN URUSAN PEMERINTAHAN
YAN RSUD MOHAMMAD NATSIR G DILAKSANAKAN

BAB II HASIL PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN YANG
DILAKSANAKAN OLEH RSUD MOHAMMAD NATSIR

2.1. CAPAIAN PELAKSANAAN PROGRAM DAN KEGIATAN

1. Capaian kinerja program sesuai dengan target kinerja yang ditetapkan dalam perjanjian kinerja
2. Capaian kinerja keluaran masing-masing kegiatan sesuai dengan target dalam dokumen anggaran
3. Analisis kesesuaian antara kegiatan dengan target kinerja program yang sudah ditetapkan dalam perjanjian kinerja

2.2. KEBIJAKAN STRATEGIS YANG DITETAPKAN

2.3. TINDAK LANJUT REKOMENDASI DPRD TAHUN ANGGARAN
SEBELUMNYA

1. Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
2. Tindak Lanjut Rekomendasi Pansus LKPJ
3. Tindak Lanjut Rekomendasi Fraksi

2.4. PENGHARGAAN YANG DITERIMA

BAB III CAPAIAN KINERJA PELAKSANAAN TUGAS PEMBANTUAN
DAN PENUGASAN

3.1. URUSAN PEMERINTAHAN YANG DITUGAS PEMBANTUAN

1. Identifikasi Tugas Pembantuan Urusan Pemerintahan Yang Diterima Dari Pemerintah Tingkat Diatasnya
2. Identifikasi Tugas Pembantuan Urusan Pemerintahan Yang Diberikan Kepada Tingkatan Pemerintahan Dibawahnya

3.2. HAMBATAN/ PERMASALAHAN DALAM PELAKSANAANTUGAS
PEMBANTUAN DAN UPAYA PENYELESAIAN

1. Permasalahan dan Upaya Penyelesaian Tugas Pembantuan Urusan Pemerintahan Yang Diterima Dari Pemerintah Tingkat Diatasnya
2. Permasalahan dan Upaya Penyelesaian Tugas Pembantuan Urusan Pemerintahan Yang Diberikan Kepada Tingkatan Pemerintahan Dibawahnya

BAB IV PENUTUP

BAB I
DATA/ INFORMASI UMUM PELAKSANAAN URUSAN
PEMERINTAHAN YANG DILAKSANAKAN
RSUD MOHAMMAD NATSIR

1. RSUD MOHAMMAD NATSIR

RSUD Mohammad Natsir merupakan SKPD dibawah Pemerintah Provinsi Sumatera Barat yang melaksanakan urusan wajib bidang Urusan Kesehatan dalam menyelenggarakan usaha kesehatan rujukan.

Berdasarkan Peraturan Daerah (Perda) Provinsi Sumatera Barat No.06 tahun 2012 tentang organisasi dan tata kerja RSUD Mohammad Natsir, pada Pasal 4 dan Pasal 5 dinyatakan bahwa tugas pokok dan fungsi RSUD Mohammad Natsir sebagai berikut:

1.1. Tugas Pokok

“Melaksanakan upaya kesehatan secara berdaya guna dan berhasil guna dengan mengutamakan upaya penyembuhan dan pemulihan yang dilakukan secara serasi, terpadu dengan upaya peningkatan dan pencegahan serta melaksanakan upaya rujukan”

1.2. Fungsi

Untuk menyelenggarakan tugas tersebut diatas RSUD Mohammad Natsir mempunyai fungsi-fungsi Pelayanan Publik sebagai berikut :

1. Penyelenggaraan Pelayanan Medis
2. Penyelenggaraan Pelayanan Penunjang Medis dan Non Medis
3. Penyelenggaraan Pelayanan dan Asuhan Keperawatan
4. Penyelenggaraan Pelayanan Rujukan
5. Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan
6. Penyelenggaraan Penelitian dan Pengembangan
7. Penyelenggaraan Administrasi Umum dan Keuangan

Fungsi – fungsi tersebut diatas dilaksanakan oleh seorang direktur sebagai koordinator

BAB II

**HASIL PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN YANG
DILAKSANAKAN OLEH RSUD MOHAMMAD NATSIR**

2.1. CAPAIAN PELAKSANAAN PROGRAM KEGIATAN

Urusan Kesehatan dilaksanakan oleh RSUD Mohammad Natsir Pada Tahun Anggaran 2021 yang mendapatkan alokasi anggaran sebesar Rp. 89.100.000.000,- dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 63.046.128.725,- atau 71%, dengan uraian sebagai berikut :

- 1. Capaian kinerja program sesuai dengan target kinerja yang ditetapkan dalam perjanjian kinerja**

Tabel 2.1
Capaian Kinerja Program Sesuai Dengan Target Kinerja
Pada Perjanjian Kinerja

No	Program	Indikator Kinerja	Target Kinerja (Perjanjian Kinerja)	Realisasi	Capaian Kinerja (%)
1	2	3	4	5	6
I	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan perorangan dan upaya kesehatan masyarakat	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	89%	91,38%	102,67%
II	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	1. Nilai Evaluasi SAKIP	A (80,01)	A (80,16)	100,18%
		2. TTK	51%	51,75%	101,47%

Keterangan:

1. Kolom 1: Diisi dengan nomor secara sistematis;
2. Kolom 2: Diisi dengan Program yang dilaksanakan;
3. Kolom 3: Diisi dengan Indikator Kinerja dalam Perjanjian kinerja;
4. Kolom 4: Diisi dengan Target Kinerja dalam Perjanjian kinerja;
5. Kolom 4: Diisi dengan Realisasi Target Kinerja;
6. Kolom 5: Diisi dengan Persentase antara Target kinerja dengan realisasi.

2. Capaian kinerja keluaran masing-masing kegiatan sesuai dengan target dalam dokumen anggaran

Tabel 2.2

Capaian Kinerja Program/Kegiatan Sesuai Dokumen Anggaran

No	Program/Kegiatan	Kebijakan	Target dalam dokumen anggaran	Realisasi	Capaian Kinerja (%)	Alokasi anggaran	Realisasi anggaran	Persentase realisasi (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
I	Program pengadaan, peningkatan sarana dan prasarana rumah sakit/rumah sakit jiwa/rumah sakit paru-paru dan rumah sakit mata							
1	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan (DAK)		167 unit	55 unit, 2/3 set	100%	10.330.487.529	9.826.616.074	95
2	Pengadaan Prasarana Fasilitas Layanan Kesehatan (DAK)		2 pt	2 pt	100%	3.861.437.000	3.667.464.200	95
II	Program Peningkatan Pelayanan BLUD RSUD							
1	Pelayanan BLUD		12 bulan	12 bulan	100%	90.183.164.793	63.539.150.777	70

Keterangan:

1. Kolom 1: Diisi dengan nomor secara sistematis;
2. Kolom 2: Diisi dengan Program/Kegiatan yang dilaksanakan;
3. Kolom 3: Diisi dengan Peraturan yang melandasi penyelenggaraan program dan kegiatan tersebut;
4. Kolom 4: Diisi dengan Target dalam dokumen anggaran;
5. Kolom 5: Diisi dengan Realisasi Target dalam dokumen anggaran;
6. Kolom 6: Diisi dengan Persentase antara Target dengan realisasi.
7. Kolom 7 : Diisi dengan Alokasi Anggaran
8. Kolom 8 : Diisi dengan Realisasi Anggaran
9. Kolom 9 : Diisi dengan Persentase Realisasi

Tabel 2.3
Permasalahan dan Upaya Mengatasi Pemasalahan Masing-Masing Program/Kegiatan

No	Program/Kegiatan	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
1	2	3	4	5
I	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi			
1	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Tidak ada masalah		Tidak ada
2	Peningkatan Pelayanan BLUD	Menurunnya pendapatan retribusi untuk membiayai belanja BLUD	Efisiensi belanja dengan membatasi jumlah jam kerja tenaga outsourcing, efisiensi belanja lainnya dan menurunkan target pendapatan pada anggaran perubahan	Tidak ada
II	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat			
1	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan	Tidak ada masalah		Tidak ada
2	Pengadaan Prasarana Fasilitas Layanan Kesehatan	Tidak ada masalah		Tidak ada

Keterangan:

1. Kolom 1: Diisi dengan nomor secara sistematis;
2. Kolom 2: Diisi dengan Program/Kegiatan yang dilaksanakan;
3. Kolom 3: Diisi dengan Permasalahan masing-masing Program/Kegiatan;
4. Kolom 4: Diisi dengan Upaya mengatasi permasalahan;
5. Kolom 5: Diisi dengan penjelasan yang menunjukkan apabila program dan kegiatan tersebut merupakan program dan kegiatan yang ditujukan untuk menjawab Rekomendasi DPRD atas LKPJ Gubernur Sumatera Barat Akhir Tahun Anggaran 2019;

3. Analisis kesesuaian antara kegiatan dengan target kinerja program yang sudah ditetapkan dalam perjanjian kinerja

- a. Program pengadaan, peningkatan sarana dan prasarana rumah sakit/rumah sakit jiwa/rumah sakit paru-paru dan rumah sakit mata:
- 1) Kegiatan Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan (DAK) dengan output kegiatan ini adalah bertambahnya alat kesehatan kedokteran dan penunjang medis lainnya sehingga secara otomatis akan meningkatkan capaian program.
 - 2) Kegiatan Pengadaan Prasarana Fasilitas Layanan Kesehatan (DAK) dengan output kegiatan berupa tersedianya pengadaan Air Bersih dan Air buangan (Limbah) yang bersumber dari DAK sehingga secara otomatis akan meningkatkan capaian program

Dari 2 kegiatan ini seluruhnya mendukung secara langsung pencapaian target dan tujuan Program-Program pengadaan peningkatan sarana dan prasarana rumah sakit.

- b. Program-Program Peningkatan Pelayanan BLUD RSUD, dicapai dengan pelaksanaan :

Kegiatan Pelayanan BLUD dengan output kegiatan ini adalah untuk memenuhi semua kebutuhan belanja BLUD Rumah Sakit sehingga secara otomatis akan meningkatkan capaian program.

Dari 1 kegiatan seluruhnya mendukung secara langsung pencapaian target dan tujuan program-program peningkatan pelayanan BLUD RSUD Mohammad Natsir.

2.2. KEBIJAKAN STRATEGIS YANG DITETAPKAN

Kebijakan yang diambil selama Tahun 2021 dalam menyelesaikan masalah masyarakat yang strategis pada RSUD Mohammad Natsir, sebagaimana tabel berikut:

Tabel 2.4
Kebijakan Strategis RSUD Mohammad Natsir Tahun 2021

No	Kebijakan Strategis	Dasar Hukum	Tujuan/Masalah Yang Diselesaikan
1	2	3	4
1	Tidak ada		

Keterangan:

1. Kolom 1: Diisi dengan nomor secara sistematis;
2. Kolom 2: Diisi kebijakan strategis yang diprakarsai oleh perangkat daerah;
3. Kolom 3: Diisi peraturan tentang kebijakan strategis tersebut berupa Peraturan Daerah/Peraturan Gubernur dan Keputusan Gubernur;
4. Kolom 4: Diisi dengan tujuan atau masalah yang diselesaikan dengan terbitnya kebijakan strategis tersebut.

2.3. TINDAK LANJUT REKOMENDASI DPRD TAHUN ANGGARAN SEBELUMNYA

Terhadap rekomendasi DPRD, Pansus LKPJ, dan Fraksi atas LKPJ Kepala Daerah Tahun Anggaran 2021 pada RSUD Mohammad Natsir telah ditindaklanjuti dengan kebijakan, program dan kegiatan yang dilaksanakan Pada Tahun anggaran 2021, dengan rincian sebagai berikut :

1. Tindak Lanjut rekomendasi DPRD:

Tabel 2.5
Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD Terhadap LKPJ Kepala Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2020

No	Rekomendasi DPRD Tahun N-1	Tindak Lanjut	Tujuan Masalah Yang Diselesaikan
1	2	3	4
1.	Tidak ada		
2.			
3.			

Keterangan:

1. Kolom 1: Diisi dengan nomor secara sistematis;
2. Kolom 2: Diisi Rekomendasi DPRD atas LKPJ Gubernur Sumatera Barat ATA 2019 yang ditujukan pada dinas terkait;
3. Kolom 3: Diisi dengan nomenklatur program dan kegiatan serta alokasi anggarannya dalam menindaklanjuti Rekomendasi DPRD yang ditujukan pada dinas/biro tersebut;
4. Kolom 4: Diisi dengan tujuan atau masalah yang diselesaikan dengan adanya program dan kegiatan serta alokasi anggarannya dalam menindaklanjuti Rekomendasi DPRD.

2. Tindak Lanjut Rekomendasi Pansus LKPJ

Tabel 2.6
Tindak Lanjut Rekomendasi Pansus LKPJ DPRD Terhadap LKPJ Kepala Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2021

No	Rekomendasi Pansus LKPJ Tahun N-1	Tindak Lanjut	Tujuan Masalah Yang Diselesaikan
1	2	3	4
1.	Tidak ada		
2.			
3.			

Keterangan:

1. Kolom 1: Diisi dengan nomor secara sistematis;
2. Kolom 2: Diisi Rekomendasi Pansus LKPJ atas LKPJ Gubernur Sumatera Barat ATA 2020 yang ditujukan pada dinas terkait;
3. Kolom 3: Diisi dengan nomenklatur program dan kegiatan serta alokasi anggarannya dalam menindaklanjuti Rekomendasi DPRD yang ditujukan pada dinas/biro tersebut;
4. Kolom 4: Diisi dengan tujuan atau masalah yang diselesaikan dengan adanya program dan kegiatan serta alokasi anggarannya dalam menindaklanjuti Rekomendasi DPRD.

3. Tindak Lanjut rekomendasi Fraksi

Tabel 2.7
Tindak Lanjut Rekomendasi Fraksi DPRD Terhadap LKPJ Kepala Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2021

No	Rekomendasi Fraksi DPRD Tahun N-1	Tindak Lanjut	Tujuan Masalah Yang Diselesaikan
1	2	3	4
1.	Tidak ada		
2.			
3.			

Keterangan:

1. Kolom 1: Diisi dengan nomor secara sistematis;
2. Kolom 2: Diisi Rekomendasi Fraksi atas LKPJ Gubernur Sumatera Barat ATA 2019 yang ditujukan pada dinas terkait;
3. Kolom 3: Diisi dengan nomenklatur program dan kegiatan serta alokasi anggarannya dalam menindaklanjuti Rekomendasi DPRD yang ditujukan pada dinas/biro tersebut;

4. Kolom 4: Diisi dengan tujuan atau masalah yang diselesaikan dengan adanya program dan kegiatan serta alokasi anggarannya dalam menindaklanjuti Rekomendasi DPRD.

2.4. PENGHARGAAN YANG DITERIMA

Dalam penyelenggaraan urusan yang dilaksanakan, RSUD Mohammad Natsir Provinsi Sumatera Barat Tahun 2021 menerima penghargaan diantaranya adalah :

Tabel 2.8
Penghargaan yang Diraih Tahun 2021

No	Nama Penghargaan	Pemberi Penghargaan	Penerima Penghargaan	Tempat dan Tanggal Penerimaan Penghargaan
1	2	3	4	5
1	Peringkat IV OPD Sangat INOVATIF di lingkungan Pemprov Sumbar tahun 2021	Pemprov Sumbar	RSUD Mohammad Natsir	Padang, Desember 2021
2	Inovasi Daerah dengan Skor Kematangan Tertinggi Setelah Validasi BPP Kemendagri RI	Pemprov Sumbar	RSUD Mohammad Natsir	Padang, Desember 2021

Keterangan:

1. Kolom 1: Diisi dengan nomor secara sistematis;
2. Kolom 2: Diisi Nama penghargaan;
3. Kolom 3: Diisi nama pemberi penghargaan dan lembaga pemberi penghargaan;
4. Kolom 4: Diisi Perangkat Daerah Penerimaan Penghargaan;
5. Kolom 5: Diisi tempat dan tanggal Penerimaan Penghargaan;

BAB III
CAPAIAN KINERJA PELAKSANAAN TUGAS PEMBANTUAN
DAN PENUGASAN

3.1. URUSAN PEMERINTAHAN YANG DITUGAS PEMBANTUAN

1. Identifikasi Tugas Pembantuan Urusan Pemerintahan Yang Diterima Dari Pemerintah Tingkat Diatasnya

RSUD Mohammad Natsir Provinsi Sumatera Barat pada Tahun 2021 *tidak mendapatkan pelimpahan wewenang dari Pemerintah Pusat dalam bentuk Tugas Pembantuan.*

BAB IV PENUTUP

Laporan Keterangan Pertanggungjawaban RSUD Mohammad Natsir Sumatera Barat Akhir Tahun Anggaran 2021 (LKPJ ATA) merupakan bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan pembangunan selama 1 (satu) tahun yang dilaksanakan mulai dari perencanaan, pelaksanaan, pengendalian dan pengawasan serta evaluasi terhadap seluruh program dan kegiatan pembangunan.

Secara prinsip dapat disimpulkan bahwa penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah berjalan cukup optimal meskipun terjadi bencana non alam Pandemi *COVID-19*, merupakan hasil sinergi dan wujud efisiensi serta efektivitas pembangunan oleh seluruh elemen pemerintahan yang tercermin dalam pencapaian target pembangunan. Di sisi lain, masih terdapat beberapa kelemahan dan permasalahan yang muncul yang salah satunya diakibatkan oleh berbagai dinamika global maupun perkembangan eksternal yang kurang terantisipasi. Berbagai kelemahan ini diharapkan dapat menjadi bahan evaluasi sebagai acuan perbaikan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan pada tahun-tahun mendatang.

Berbagai keberhasilan yang dicapai dalam penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan Daerah pada Tahun Anggaran 2021 patut disyukuri. Keberhasilan diraih atas kerjasama dan partisipasi semua komponen Pemerintahan Daerah, yaitu jajaran Eksekutif (Pemerintah Daerah) baik di tingkat Provinsi maupun Kabupaten/Kota, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan seluruh elemen masyarakat. Pemerintah Provinsi Sumatera Barat memberikan apresiasi yang setinggi-tingginya dan terima kasih kepada seluruh komponen pemangku kepentingan dan masyarakat Provinsi Sumatera Barat yang mendukung situasi dan kondisi tetap terjaga kondusif sehingga penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan dapat berjalan tertib, lancar dan sukses.

Disamping berbagai keberhasilan yang telah dicapai, tentu masih terdapat kekurangan yang perlu ditingkatkan, melalui mekanisme penyampaian LKPJ ini Pemerintah Provinsi Sumatera Barat membuka selebar-lebarnya kepada publik untuk memberikan masukan, saran dan kritiknya guna perbaikan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di masa yang akan datang. Disamping itu pelaksanaan pembangunan Tahun 2021 dapat dijadikan tonggak untuk pembangunan Sumatera Barat pada Pembangunan Jangka Menengah Daerah selanjutnya.

Demikian penyampaian Laporan Kinerja Pertanggungjawaban Gubernur Sumatera Barat Akhir Tahun Anggaran 2021, dengan harapan semoga kinerja pembangunan daerah senantiasa dapat lebih baik dan memiliki daya guna bagi segenap masyarakat.

Semoga Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa, melimpahkan rahmat, hidayah, perlindungan dan petunjuk-NYA kepada kita semua.